

Permadi:

“Partai Lokal Jadi Alternatif untuk Kehidupan Kepartaian tak Sehat”

Keberadaan partai lokal bisa dianggap sebagai jalan keluar ketika model kepartaian yang bersifat nasional seperti sekarang mengalami kebuntuan dalam hal penyerapan aspirasi. Namun kehadiran partai lokal ini secara formal belum dijamin UU Partai Politik-kecuali di Aceh. Berikut wawancara Widiyanto dan Herni Sri Nurbayanti dari JENTERA dengan Permadi, mantan anggota Pansus RUU Pemerintahan Aceh dari Fraksi PDI Perjuangan tentang wacana pembentukan partai lokal tersebut. Wawancara berlangsung di ruang kerja Permadi.

Bagaimana komentar Anda tentang partai lokal?

Secara formal UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tidak mengakui partai lokal. Jadi partai harus bersifat nasional dengan segala cabang-cabangnya. Berpusat di ibukota negara. Itu aturannya. Tapi boleh saja saya memiliki ide berbeda. Jika dikontekskan dengan keadaan Indonesia seperti ini, saya dapat menyetujui adanya partai lokal karena dapat dijadikan alternatif dari partai-partai politik sekarang yang sudah sangat tidak sehat. Kemunafikan-kemunafikan telah terjadi dan dilakukan oleh partai politik yang ada. Sudah mengingkari konstitusi, dan sebagainya. Partai bisa bermuka ganda dengan segala cara. Contoh lain kalau ada interpelasi dari partai politik, terus dikumpulkan di Dharmawangsa, tentu dengan *ubo-rampe*-nya, dapat uang amplop, seluruh partai politik yang sudah menandatangani interpelasi berubah jadi tidak setuju. Ini seperti main-main saja. Oleh karena itu diperlukan alternatif-alternatif, bukan saja partai lokal tapi juga calon independen. Singkatnya, saya dapat menyetujuinya.

Permadi ■ Partai Lokal jadi Alternatif

Apa yang akan Anda lakukan untuk merealisasikan dukungan Anda terhadap keberadaan partai lokal?

Saya tidak akan melakukan apa-apa karena ini tergantung kepemimpinan nasional dan kita tahu sekarang kepemimpinan nasional ini sangat lemah yang saya yakin pemimpin ini tidak mampu mengontrol partai lokal. Jadi partai lokal ini terkait dengan kepemimpinan nasional. Zaman Soekarno partai mau dijadikan satu dalam Partai Popor, zaman Soeharto ada tiga partai yang ada di DPR. Mana ada yang berani?

Bagaimana Anda melihat partai lokal dengan nasionalitas Indonesia?

Sebenarnya partai lokal ini alternatif. Kalau partai nasional ini dapat mewakili aspirasi rakyat, tidak mungkin akan muncul partai lokal. Namun karena partai nasional dianggap mengkhianati aspirasi rakyat, semua untuk kepentingan partai, semua untuk kepentingan pribadi maka wajar muncul ide untuk menyelenggarakan partai lokal.

Bagaimana tanggapan partai Anda terhadap partai lokal?

Karena saya bukan fungsionaris partai, tidak ikut rapat-rapat, maka saya tidak tahu.

Terus bagaimana bila dikaitkan dengan asas PDI Perjuangan yang nasionalis?

Nasionalisme itu tidak sempit. Nasionalisme itu artinya aspirasi nasional termasuk aspirasi daerah. Sepanjang partai lokal berideologi Pancasila, berdasarkan UUD, terus mempertahankan NKRI, kenapa tidak? Saya sudah katakan partai lokal yang saya tentang adalah partai yang mendukung separatisme.

Lantas bagaimana pendapat Anda tentang relasi partai lokal dan partai nasional yang ideal?

Yang sehat harus ada koordinasi atau hubungan baik antar mereka meski sepertinya tidak mungkin. Partai nasional saja tidak ada relasi satu dengan lainnya. Apakah Anda yakin PKS bisa bersatu dengan Partai Golkar, kecuali kepentingan tertentu? Yang ingin saya tekankan masyarakat Indonesia saat ini belum dewasa berpolitik sehingga kita mau meniru Amerika yang hanya ada dua partai sedang di Indonesia sekarang sudah ada lebih dari 300 partai politik.

Ada kekuatiran bila partai lokal ini diadakan di semua daerah, ini akan mengubah relasi pusat-daerah selama ini. Daerah lebih punya peluang untuk mengelola kekuasaan sehingga bisa timbul terjadinya separatisme..

Saya menghargai pendapat itu tapi kita harus objektif kenapa hal itu bisa muncul. Menurut saya itu penyebabnya adalah otonomi daerah tidak jalan. Dalam UU Pemerintah Daerah, disebutkan semua kekuasaan diserahkan ke daerah kecuali lima hal: hubungan luar negeri, fiskal, pertahanan, pengadilan, dan agama. Tapi buktinya pertambangan, kelautan masih dicampuri. Ini yang menimbulkan ketidakpuasan sehingga saya kuatirkan akan muncul gerakan Papua Merdeka, Aceh Merdeka, dan lainnya. Itu tidak bisa disalahkan karena kerakusan pemerintah pusat untuk menguasai sumber-sumber daya alam. Lain halnya bila UU Otonomi Daerah tidak berbunyi demikian.

Apa yang Anda maksud dengan alasan objektif tersebut?

Objektif itu sesuai dengan UU-nya. Aturannya seperti apa, kita harus lakukan seperti bunyinya. Jadi yang ditangani pemerintah pusat hanya 5 hal saja. Jangan ditambah macam-macam. Tapi di zaman seperti sekarang memang berbahaya menyerahkan lima pilar kekuasaan ini ke daerah. Akibatnya, bila dulu korupsi terpusat di Jakarta sekarang menyebar ke daerah-daerah.

Apakah ini bukan dikarenakan faktor masa lalu yang sentralistik?

Saya melihatnya dari dua sisi. Dari sisi rasional, politik, sosial ya karena pemerintah saat itu sangat rakus, kekayaan daerah disedot, dikorupsi habis-habisan. Konsekuensinya ada Papua Merdeka, Aceh Merdeka, Riau Merdeka, dsb. Itu bisa mengerti. Tapi kalau dari sisi spiritual, Indonesia masuk zaman *nggak* karuan. Korupsi merajalela. Menurut pemahaman spiritual saya ini akan terus terjadi sampai nanti muncul “goro-goro”.

Bagaimana Anda melihat kemunculan partai lokal di Aceh dengan desain negara kesatuan Indonesia?

Kalau kita memberikan otonomi khusus, partai lokal harus kita anggap sebagai sesuatu yang wajar. Ini yang tidak bisa begitu saja berlaku untuk daerah-daerah lain menuntut partai lokal sebelum ada UU khusus. Ini soal formalitas saja. Sedang, kalau Bali sampai menuntut otonomi

Permadi ■ Partai Lokal jadi Alternatif

khusus dan menurut saya wajar-wajar saja mengingat segala kekhususan-kekhususannya.

Artinya perlu dibuka peluang untuk mendirikan partai lokal di UU?

Untuk daerah-daerah tertentu, saya kira bisa.

Selain Bali mana?

Mungkin Papua, tapi dalam pengertian jangan memberi peluang buat separatisme.

Ketika ikut pembahasan RUU Pemerintahan Aceh apa pendapat PDI Perjuangan tentang partai lokal?

Masing-masing anggota berbeda. Saya sendiri, berdasarkan formalitas, kurang menyetujui adanya partai lokal di Aceh karena ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tidak bisa begitu saja diselesaikan lewat pengakuan partai lokal. GAM itu mantan pemberontak, baru turun gunung, terus diberi fasilitas-fasilitas banyak, diawasi dunia internasional. Itu saya anggap mengurangi kedaulatan Indonesia. Berbeda dengan Bali, misalnya, yang sekarang menuntut otonomi khusus seperti di Aceh. Bila diperbolehkan adanya partai lokal di Bali menurut saya tak ada masalah karena tidak pernah memberontak. Jadi ide ini jangan dicampurkan dengan separatisme.

Bukankah pengakomodasian partai lokal di Aceh bisa juga dianggap sebagai bagian dari solusi?

Tidak bisa. Kalau pemberontak itu sampai menang, terus lepas, bagaimana?

Tapi bukankah sekarang masih tetap dalam kerangka negara kesatuan?

Idenya demikian. Tapi kalau mereka kuat terus bisa sampai referendum, bagaimana? Katakanlah sekarang di Aceh mereka kuat, terus mengajukan referendum, bisa apa pemerintah pusat?

Artinya perlu ada kualifikasi atau kriteria-kriteria tertentu?

Harus.

Dalam sebuah survey yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia setelah disahkan partai lokal di Aceh dalam UU Pemerintahan Aceh, rasa kebanggaan orang Aceh terhadap Indonesia justru makin meningkat..

Mungkin karena aspirasinya tertampung, karena partai-partai politik yang ada tidak menampung aspirasinya. Partai politik yang ada berlomba-lomba mencari kekuasaan, kedudukan, harta. Setelah ada partai lokal, mungkin aspirasi warga tertampung. Tapi pasti ada *side-effect*-nya.

Bagaimana Anda melihat keberadaan partai lokal dengan meningkatnya komunitarianisme di Aceh?

Secara prinsip, munculnya partai lokal ini untuk kepentingan masyarakat lokal di Aceh. Partai politik yang ada tidak mampu mengakomodir aspirasi, tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh. Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat juga sama saja. Partai lokal ini reaksi dari kondisi demikian yang memiliki idealisme terhadap rakyat Aceh. Saya khawatir sekarang ini zaman *edan*, moral rusak, maka kita akan mengulang kesalahan yang sama.

Masalah Aceh hampir sama dengan masalah Papua dalam hal tuntutan gerakan pemisahan diri, meski konteksnya berbeda. Partai lokal di Aceh bisa diterima lewat MoU Helsinki. Untuk Papua sampai sekarang belum diakomodasi. Bagaimana pendapat Anda mengenai perbedaan ini?

Perbedaan ini dasarnya perbedaan kondisi. Di Aceh campur tangan luar negeri berbeda dengan di Papua. Kalau di Papua jelas murni kemerdekaan dengan segala cara. Sementara Aceh masih bisa dikendalikan oleh pemerintah pusat, GAM pun setuju. Di Papua, senator-senator Amerika sangat jelas menghendaki kemerdekaan. Juga dukungan-dukungan negara Melanesia yang lain.

Ngomong-ngomong bagaimana perkembangan RUU Partai Politik sekarang, apakah akan mengakomodir keberadaan partai lokal?

Saya belum tahu. Ini perlu diantisipasi sebab ada arogansi bila partai lokal diakomodir, akan banyak tokoh-tokoh partai yang mendirikan partai lokal karena perbedaan-perbedaan kepentingan, bukan prinsip, dan itu

Permadi ■ Partai Lokal jadi Alternatif

akan menyebarkan mereka lari. Sebagai contoh PDI Perjuangan. Partai ini sudah mengalami perpecahan banyak sekali. Dimulai Partai Pelopor oleh Rachmawati, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Eros Djarot, kemudian Partai Indonesia Tanah Air (PITA) Dimiyati Hartono, kemudian Partai PNI Marhaenis (Ibu Peni dan Sukmawati), terakhir Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy Janis dkk. Jadi patah tumbuh hilang berganti. Ideologinya sama-sama banteng, sama Soekarno, Marhaen. Kepentingannya saja yang berbeda.